

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Soekadijo dalam Luthfi (2013: 1) pariwisata adalah segala kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan. Berdasarkan pengertian ini dapat dinyatakan bahwa adanya wisatawan yang berkunjung membuat aktivitas pemerintah daerah, swasta dan anggota masyarakat di daerah tujuan wisata menjadi bertambah. Pemerintah melalui jalur birokrasinya mengatur kedatangan dan kepulangan wisatawan. Swasta berperan dalam menyediakan tempat penginapan (hotel), hiburan (diskotik dan karaoke), dan tempat makan minum (restoran). Sementara itu masyarakat setempat berperan sebagai penunjuk jalan (*guide*) dan menyediakan barang-barang cenderamata.

Sektor pariwisata merupakan salah satu komponen dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan pariwisata dan industri harus dilakukan secara berkelanjutan sehingga memberikan manfaat langsung untuk kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan dalam pengembangan sektor pariwisata meliputi: pemasaran pariwisata nasional dengan mendatangkan jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara, pembangunan destinasi pariwisata dengan meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam dan luar negeri, pembangunan industri pariwisata dengan meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk dan jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran dan pembangunan kelembagaan pariwisata dengan membangun sumberdaya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pariwisata menyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan sebagai bagian dari pembangunan nasional mempunyai tujuan antara lain memperluas dan pemeratakan kesempatan

berusaha, lapangan kerja dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian pembangunan di bidang kepariwisataan mempunyai tujuan akhir untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peranan pariwisata dalam pembangunan negara secara makro meliputi tiga segi yakni segi ekonomis (sumber devisa, pajak-pajak), segi sosial (penciptaan lapangan kerja), dan segi kebudayaan (memperkenalkan kebudayaan kepada para wisatawan). Ketiga segi tersebut tidak saja berlaku bagi wisatawan asing, tetapi juga untuk wisatawan-wisatawan domestik yang kian meningkat perannya Spillane dalam Hiariey (2013: 1).

Keberhasilan pengembangan sektor pariwisata pada suatu daerah yang direfleksikan oleh meningkatnya kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap PDRB, serta kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Pengukuran kinerja keuangan daerah menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap laporan perhitungan APBD. Hasil analisis rasio keuangan selanjutnya digunakan untuk menilai kinerja keuangan daerah yaitu untuk mengukur upaya pemerintah daerah dalam menggali pendapatan asli daerah, mengukur kemandirian keuangan daerah serta mengukur aktivitas pemerintah dalam mengalokasikan dananya untuk pelayanan publik.

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah yang perannya sangat tergantung pada kemampuan dan kemauan daerah dalam menggali potensi di daerah. Pendapatan asli daerah idealnya menjadi sumber utama pendapatan daerah, karena sumber pendapatan lain relatif fluktuatif dan cenderung diluar kontrol (kewenangan) pemerintah daerah (Sidik dalam Widiastuti, 2013). Pendapatan asli daerah juga harus dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah serta pemanfaatannya benar-benar untuk pengeluaran yang produktif atau dapat dirasakan oleh masyarakat, seperti untuk sektor pendidikan,

pelayanan kesehatan, infrastruktur fisik kota/kabupaten (Saragih dalam Widiastuti, 2013).

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya keuangannya secara optimal (Simanjuntak dalam Widiastuti, 2013). Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah dapat mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk kepentingan publik, yaitu secara langsung berupa “pembayaran transfer”, dan secara tidak langsung melalui penciptaan lapangan kerja, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, dan sebagainya (Todaro dalam Widiastuti, 2013).

Provinsi Lampung memiliki letak geografis yang sangat menguntungkan, letaknya sangat strategis karena berada di ujung Pulau Sumatera bagian selatan sekaligus menjadi gerbang utama penghubung Pulau Jawa dan Sumatera. Kondisi alamnya terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah dan perairan yang cukup luas. Melihat dari letak geografisnya dan kondisi alamnya menyebabkan munculnya keanekaragaman suku, budaya, dan potensi wisata yang menjadikan Lampung menjadi salah satu daerah yang kaya akan potensi pariwisata. Industri pariwisata merupakan peluang yang tidak dapat dilepaskan begitu saja bagi Provinsi Lampung.

Sektor pariwisata mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan lapangan kerja dan menjadi *multiplier effect* untuk pengembangan sektor perekonomian yang lain. Objek wisata yang dimiliki Lampung belum ditata dengan baik menjadi daya tarik wisata unggulan, padahal potensinya sangat besar karena alam yang dimiliki masih asli dan memiliki budaya khas dan unik Lampung. Obyek wisata unggulan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Lampung adalah : 1) Kawasan Wisata Bakauheni dan Land Mark Menara Siger, 2) Kawasan Ekowisata Kalianda dan sekitarnya, 3) Kawasan Wisata Agro

Pekalongan, Lampung Timur, 4) Pengembangan Ekowisata Taman Hutan Rakyat Gunung Betung, 5) Pengembangan Ekowisata Taman Nasional Way Kambas, dan 6) Pengembangan Ekowisata Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

Tabel 1.1 Data Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung Tahun 2008-2015

Tahun	PDRB-Pariwisata
2008	Rp255.467.070.000
2009	Rp305.421.440.000
2010	Rp384.708.845.824
2011	Rp479.501.105.435
2012	Rp589.786.359.685
2013	Rp720.129.145.175
2014	Rp862.714.715.920
2015	Rp995.572.782.172

Sumber : BPS Lampung

Dari data BPS Lampung telah membuktikan bahwa PDRB (Produk Domesik Regional Bruto) pariwisata setiap tahunnya meningkat. Dilihat dari pendapatan hasil perdagangan, hotel, dan restoran. selama periode tahun 2008-2015 di provinsi lampung

Tabel 1.2 Data Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita Provinsi Lampung Tahun 2008-2015

Tahun	PDRB-Perkapita
2008	Rp 9.880.300
2009	Rp 11.797.000
2010	Rp 14.193.000
2011	Rp 16.630.000
2012	Rp 18.611.000
2013	Rp 20.725.083
2014	Rp 23.195.513
2015	Rp 26.326.907

Sumber : Data BPS Lampung

Dari data BPS Lampung telah membuktikan bahwa PDRB (Produk Domesik Regional Bruto) perkapita setiap tahunnya meningkat selama periode tahun 2008-2015 di provinsi lampung.

Tabel 1.2 Data Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008-2015

Tahun	Pendapatan Daerah	PAD	(Kinerja Keuangan)
2008	Rp1.373.578.800.410	Rp 796.540.047.290	0,579901238
2009	Rp1.597.184.651.640	Rp 915.563.272.750	0,573235707
2010	Rp1.971.832.903.260	Rp 1.116.540.576.530	0,566245027
2011	Rp2.527.990.901.620	Rp 1.395.675.720.660	0,552088902
2012	Rp3.742.004.283.150	Rp 1.687.701.199.410	0,451015304
2013	Rp4.191.044.797.128	Rp 1.898.663.849.336	0,453028765
2014	Rp5.071.164.204.525	Rp 2.303.079.249.245	0,454151977
2015	Rp5.679.703.909.068	Rp 2.584.054.917.653	0,454962963

Sumber : Data BPS Lampung

Dari data BPS Lampung telah membuktikan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah di provinsi lampung yang dihitung berdasarkan rasio PAD terhadap pendapatan daerah mengalami kenaikan dan penurunan selama periode tahun 2008-2015.

Fenomena menunjukkan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Provinsi Lampung masih rendah dibandingkan dengan potensi pariwisata yang dimilikinya. Dari data BPS (*Badan Pusat Statistik*) telah membuktikan bahwa PDRB (Produk Domesik Regional Bruto) pariwisata setiap tahun meningkat dan dengan PDRB perkapita atau pendapatan masyarakat setiap tahun meningkat, sedangkan kinerja keuangan pemerintah daerah di provinsi lampung yang dihitung berdasarkan rasio PAD terhadap pendapatan daerah mengalami kenaikan dan penurunan selama periode tahun 2008-2015.

Sektor pariwisata mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan lapangan kerja dan menjadi *multiplier effect* untuk pengembangan sektor perekonomian yang lain. Objek wisata yang dimiliki Lampung belum ditata dengan baik menjadi daya tarik wisata unggulan, padahal potensinya sangat besar karena alam yang dimiliki masih asli dan memiliki budaya khas dan unik Lampung. Obyek wisata unggulan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Lampung adalah : 1) Kawasan Wisata Bakauheni dan Land Mark Menara Siger, 2) Kawasan Ekowisata Kalianda dan sekitarnya, 3) Kawasan Wisata Agro Pekalongan, Lampung Timur, 4) Pengembangan Ekowisata Taman Hutan Rakyat Gunung Betung, 5) Pengembangan Ekowisata Taman Nasional Way Kambas, dan 6) Pengembangan Ekowisata Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

Penelitian terdahulu telah dilakukan untuk menganalisis pengaruh sektor pariwisata terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan kesejahteraan masyarakat, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Widiastuti (2013) dengan judul Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Kinerja Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali dan Biro Keuangan Setda Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil bahwa sektor pariwisata berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Dengan analisis jalur diketahui bahwa sektor pariwisata berpengaruh tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kinerja keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali. variabel budaya organisasi, komitmen organisasi dan akuntabilitas publik mempunyai pengaruh terhadap kinerja pegawai.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan widiastuti (2013) Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah pada objek penelitian, karena penulis menjadikan provinsi Lampung sebagai objek penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat (Studi kasus Pada Pemda Provinsi Lampung) “**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas. Maka permasalahan yang muncul pada penelitian ini adalah:

1. Apakah sektor pariwisata berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Lampung?
2. Apakah sektor pariwisata berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat daerah Provinsi Lampung?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dilakukan agar penelitian dan pembahasannya lebih terarah, sehingga hasilnya tidak bias dan sesuai dengan harapan peneliti. Adapun ruang lingkup penelitiannya adalah menguji pengaruh sektor pariwisata terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Lampung dan kesejahteraan masyarakat di Propinsi Lampung.

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Membuktikan secara empiris pengaruh sektor pariwisata terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Lampung.
2. Membuktikan secara empiris pengaruh sektor pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat daerah Provinsi Lampung.

1.5. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan serta bukti empiris mengenai pengaruh sektor pariwisata terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis / bagi pemerintah
Sebagai sumbangan pemikiran agar dapat digunakan atau diambil manfaatnya dan dijadikan bahan untuk pertimbangan dalam usaha mengambil kebijakan berkenaan dengan sektor pariwisata, kinerja keuangan dan kesejahteraan masyarakat.
 3. Bagi Peneliti
Sebagai bahan pertimbangan antara teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi di lapangan dan pengembangan mengenai akuntansi keprilakuan.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam hal ini sistematika penulisan diuraikan dalam 5 bab secara terpisah, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, Perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Menguraikan tentang teori-teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi sumber data, metode pengumpulan data, seperti menjelaskan populasi dan sampel penelitian, fokus penelitian, variabel penelitian, teknik analisis data, metode analisis data, dan pengujian hipotesis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memdemonstrasikan pengetahuan akademis yang dimiliki dan ketajaman daya fikir peneliti dalam menganalisis persoalan yang dibahas, dengan berpedoman pada teori-teori yang dikemukakan pada Bab II.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Menguraikan kesimpulan tentang rangkuman dari pembahasan, terdiri dari jawaban terhadap perumusan masalah dan tujuan penelitian serta hipotesis. Saran merupakan implikasi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan praktis.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**